



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PERMENTAN/RC.110/8/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
46/PERMENTAN/RC.110/12/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan, penerima manfaat, dan anggaran bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 serta untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
17. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1963);

36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46/PERMENTAN/RC.110/12/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:

1. Huruf B angka 1 huruf c diubah, huruf d ditambahkan butir 3), angka 2 huruf a dan huruf b, angka 5 huruf e, dan angka 6 huruf c dan huruf d diubah sehingga huruf B angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Format 2 nomor 1 dan nomor 2 diubah sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Format 3 nomor 1 sampai dengan nomor 7 diubah sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PERMENTAN/RC.110/8/2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2018

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH

B. Program, Kegiatan, dan *Output* Kegiatan Bantuan Pemerintah

Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 ditampung pada DIPA Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu:

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan tersebut meliputi:
 - a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai
 - 2) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubikayu
 - 3) Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau
 - 4) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar
 - 5) Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya.

- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi;
 - 2) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik;
 - 3) Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya.
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan yaitu Fasilitas Desa Mandiri Benih, fasilitas penyediaan benih bersertifikat dan fasilitas dukungan teknis pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan.
- d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI adalah sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI;
 - 2) Sarana dan Bahan Pengendalian OPT;
 - 3) Penerapan Penanganan DPI.
- e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan adalah Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan dan Dukungan Teknis/Operasional menunjang produksi padi, jagung dan kedelai.
- f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan;
 - 2) Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU;
 - 3) Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
 - 4) Penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan.

2. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan bawang merah, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran lainnya, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan florikultura. Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan jeruk, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah lainnya, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan mangga, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan manggis, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan pisang, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan florikultura, fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya.

d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana benih hortikultura, pengadaan benih bawang merah, pengadaan benih cabai, pengadaan benih sayuran lainnya, pengadaan benih jeruk, pengadaan benih buah lainnya.

- e. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perlindungan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah, fasilitasi sarana produksi pengembangan desa pertanian organik.
5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan tersebut meliputi:
 - a. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian
Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A). Bantuan yang diberikan berupa pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, pengembangan irigasi perpipaan/irigasi perpompaan, irigasi air permukaan, dan pengembangan dam parit/long storage.
 - b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan
Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu, peningkatan IP rendah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang diberikan berupa design cetak sawah, optimasi lahan dalam bentuk pemanfaatan lahan sub optimal, pengembangan kawasan sawah organik dan perluasan sawah.
 - c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Kegiatan ini untuk mendorong petani menuju ke arah sistem pertanian modern, menurunkan jumlah keterceceran hasil produksi (*losses*), mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dan waktu pengolahan lahan. Bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian modern meliputi traktor roda 2, traktor roda 4 tanaman pangan, pompa air, *rice transplanter*, *cultivator*, *excavator*, *hand sprayer* dan *corn planter*.

d. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Kegiatan ini dalam rangka pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani padi dan peternakan sehingga keberlangsungan usahatani padi dan peternakan dapat terjamin. Bantuan yang diberikan berupa pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin. Pelaksanaan asuransi pertanian disinergikan dengan program/kegiatan Kementan dan pemerintah daerah.

e. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yang tidak dapat ditampung dalam kegiatan-kegiatan di atas dan fasilitasi penyediaan bantuan kandang ayam/itik mendukung program #Bekerja.

6. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian serta Pendidikan Pertanian

Kegiatan tersebut meliputi:

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, penyuluhan dan peningkatan kinerja penyuluh dan fasilitasi teknis dukungan penyuluhan pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional pembelajaran pengadaan saprodi dan pengolahan hasil produksi, penghargaan untuk penyuluh pertanian teladan, penghargaan untuk BPP terbaik, penghargaan untuk petani, penghargaan untuk Gapoktan dan penghargaan untuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani dan layanan dukungan manajemen pelatihan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana P4S, penghargaan P4S berprestasi tingkat nasional serta penghargaan widyaiswara berprestasi.

c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani yang dibiayai oleh PHLN. Bantuan yang diberikan berupa pengadaan benih padi, pengadaan ayam, vaksin dan pakan untuk program #Bekerja dan pengadaan handphone.

d. Pendidikan Pertanian

Kegiatan bantuan Pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) melalui regenerasi petani, penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian di SMK-PP dan layanan dukungan manajemen pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan operasional PWMP, beasiswa PWMP, Bantuan Praktek Siswa, Pembangunan/Rehabilitasi SMK-PP Polewali Mandar, pengadaan komputer (PC), LCD, pengadaan ayam, vaksin dan pakan untuk program #Bekerja.

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

Format 2.

KEGIATAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai
		2.	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubikayu
		3.	Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau
		4.	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar
		5.	Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya
		6.	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi
		7.	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik
		8.	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya
		9.	Fasilitas Desa Mandiri Benih
		10.	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat
		11.	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
		12.	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT

No.	Eselon I	Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		13.	Penerapan Penanganan DPI
		14.	Sarana dan Bahan Pengendalian OPT
		15.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
		16.	Fasilitas Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai
		2.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan bawang merah
		3.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran lainnya
		4.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
		5.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan jeruk
		6.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah lainnya
		7.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan mangga
		8.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan manggis
		9.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan pisang
		10.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan florikultura
		11.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan

No.	Eselon I	<i>Output Kegiatan yang Ditetapkan</i>	
1	2	3	
		12.	Fasilitasi sarana prasarana benih dan hortikultura
		13.	Pengadaan benih bawang merah
		14.	Pengadaan benih cabai
		15.	Pengadaan benih sayuran lainnya
		16.	Pengadaan benih jeruk
		17.	Pengadaan benih buah lainnya
		18.	Fasilitasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah
		19.	Fasilitasi sarana produksi pengembangan desa pertanian organik

Format 3.

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	<i>OUTPUT</i> KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubikayu	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga	Peningkatan Produksi Ubikayu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk
			3. Fasilitasi Penerapan Budidaya Kacang Hijau	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Kacang Hijau	Ha	Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			4. Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubi Jalar	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/	Peningkatan Produksi Ubi Jalar	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			5. Fasilitasi Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produksi Ubi Talas	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Padi (inbrida eks cetak sawah, gogo/lahan kering padi rawa, padi khusus lainnya, padi lahan sub optimal spesifik lokasi, inbrida, dan mina padi)	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Padi Organik	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Padi Organik Wilayah Perbatasan	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Sarana Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Jagung	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Gandum	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gapoktan/ Poktan/ LMDH/Koperasi/ Asosiasi/Profesi/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Bantuan Saprodi Budidaya Sorgum	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Fasilitas Desa Mandiri Benih	Kelompok tani atau kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar	Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedelai	Unit	
					Pengembangan Desa Mandiri Benih Jagung	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	Gapoktan/Poktan /LMDH/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Masyarakat	Bantuan Benih Padi Inbrida Bantuan Benih Padi Lahan Kering Bantuan Benih Padi Hibrida Bantuan Pupuk Pengenalan Budidaya Padi Varietas Unggul Baru Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi	Ha Ha Ha Ha Ha Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			3. Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Gapoktan/Poktan /LMDH/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Masyarakat	Bantuan Benih Padi Inbrida	Bulan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	1. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya berpotensi terkena serangan OPT	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	Paket	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung	Paket	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Kedelai	Paket	
			2. Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah endemis dan potensi serangan OPT	Dem Area-Budidaya Tanaman Sehat	Ha	
				LPHP/LAH/Instalasi Pengamatan dan Pengendalian OPT (IP3)PT)/Sub Unit PPTPH	Dem Area Penanganan DPI	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Petugas THL POPT dan POPT di Bidang Tanaman Pangan	Mobil Operasional LPHP	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
				Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya berpotensi serangan atau terserang OPT	Motor Operasional Pengamatan POPT	Unit	
					Pestisida	Paket	
			3. Penerapan Penanganan DPI	Petani/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya di daerah rawan DPI	Bahan dan/ atau Alat Pendukung PPDPI (Pembuatan sumur pantek dan pompa air	Paket	
				(banjir/kekeringan)	Bahan dan/ atau Alat Pendukung PPDPI (Pembuatan biopori)	Paket	
		5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kelompok Tani	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang pertanian	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Poktan/Gapoktan	Dukungan Teknis/Operasional menunjang produksi padi, jagung dan kedelai	Paket	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Kelompok Usaha Bersama/ Lembaga Lainnya	<i>Combine Harvester</i> Kecil, Sedang, Besar dan Multifungsi	Unit	
					<i>Corn Combine Harvester</i> Besar	Unit	
					<i>Corn Sheller</i>	Unit	
					<i>Power Thresher/ Power Thresher</i> Multiguna	Unit	
					<i>Moisture Tester</i>	Unit	
					<i>Vertical Dryer</i> Jagung + Bangunan (Kap 6 Ton)	Unit	
					Revitalisasi <i>Dryer</i>	Unit	
					Pembersih Biji Kedelai (<i>seed cleaner</i>)	Unit	
					Pengayak Kedelai	Unit	
					Sarana Angkut Roda 3	Unit	
		Lantai Jemur	Unit				

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda/ Kelompok Usaha Bersama/Lembaga Lainnya	RMU + Bangunan (Non Organik, Daerah Perbatasan, Organik dan Korporasi)	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
					Revitalisasi RMU (<i>Grading/Packing</i>)	Unit	
					SP3T (Sentra Pertanian Padi Terpadu)/sarana prasarana dan Rehab Bangunan	Unit	
					Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kapasitas 6, 10, 30 Ton)	unit	
					<i>Rice Milling Plan</i> (RMP) + Bangunan	Unit	
					<i>Dryer Fluidyzed</i> + Bangunan	Unit	
					Revitalisasi <i>Dryer</i>	Unit	
					<i>Dryer UV</i>	Unit	
					<i>Dryer Mobile</i>	Unit	
			3. Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan /UPJA/Pemda /Kelompok Usaha Bersama/ Lembaga Lainnya	UPH (Jagung dan Kedelai)+ Bangunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan	Sertifikasi Organik	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Aneka Cabai	Ha	
			2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Ha	
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Jeruk	Ha	
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Buah Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi pengembangan Kawasan Mangga	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi pengembangan Kawasan Manggis	Ha	
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Pisang	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Kawasan Florikultura	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Florikultura	M ²	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			7. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan	Ha	
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat	Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Unit	
			2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perorangan/ masyarakat	Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Kelompok tani/ Gapoktan/ Balai Benih Hortikultura	Fasilitasi Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Benih Bawang Merah	Kelompok tani/ Gapoktan/ Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat	Pengadaan benih Bawang Merah	Kg	
			3. Benih Cabai	Kelompok tani/ Gapoktan/ Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat	Pengadaan Benih Cabai	Batang	
			4. Benih Sayuran Lainnya	Kelompok tani/ Gapoktan/ Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat	Pengadaan Benih Sayuran Lainnya	Ton	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Benih Jeruk	Kelompok tani/ Gapoktan/ Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat	Pengadaan Benih Jeruk	Batang	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			6. Benih Buah Lainnya	Kelompok tani/ Gapoktan/ Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat	Pengadaan Benih Buah Lainnya	Batang	
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	Kelompok tani/ Gapoktan/balai proteksi perlindungan hortikultura/ masyarakat	Fasilitasi Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	Ha	
			2. Desa Pertanian Organik	Kelompok tani/Gapoktan/ Masyarakat	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Desa Pertanian Organik	Desa	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Pengembangan Tanaman Kopi	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Pengembangan Tanaman Kakao	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Pengembangan Tanaman Karet	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			4. Pengembangan Tanaman Kelapa	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya (The, Jambu Mete, Kemiri Sunan, Sagu, Aren)	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			6. Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan	Lokasi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Fasilitasi Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Prov	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		2. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			3. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Desa	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Fasilitasi Perlindungan Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Operasional Brigade Proteksi Tanaman	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		3. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Pengembangan Tanaman Tebu	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya (Kapas, Nilam, Tembakau, Gambir, Lada, Pala, Cengkeh, Vanili)	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			3. Fasilitasi Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Prov	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	KT	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Monitoring dan Surveilans Penjamin Mutu dan Keamanan Produk Perkebunan	Prov	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		5. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	KT	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			3. Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Fasilitasi Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Prov	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Traktor	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		8. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman	1. Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Prov	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Sarana Pengembangan Paket Teknologi Proteksi	Paket Teknologi	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			3. Fasilitasi Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani /Gapoktan yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Prov	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Program Pemenuhan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Peternak/UPTD	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan	Ha	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Masyarakat	Pelayanan UPT Pusat	Ton	
			3. Mutu dan Keamanan Pangan	Masyarakat	Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	
		2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Masyarakat/ Kelompok Ternak	1. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	Dosis	
					2. Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza	Dosis	
					3. Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis	Dosis	
					4. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Ternak/ Perorangan/ Petugas IB	1. Fasilitas Alat dan Bahan IB	Paket	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
					2. Pengadaan N2 Cair	Liter	
					3. Operasional IB dan Kelahiran	Akseptor	
					4. Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	
					5. Introduksi	Akseptor	
			2. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak	Kawasan Ternak Ruminansia Potong	Ekor	
				Kelompok Peternak/UPTD	Penambahan Indukan	Ekor	
		3. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak	Ternak Kelinci	Ekor		
				Ternak Babi	Ekor		
				Ternak Unggas	Ekor		
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	1. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Masyarakat	Sarana dan Prasarana Pemotongan Hewan Qurban	Kegiatan			
	2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Masyarakat	Monitoring dan Surveilans Produk Hewan	Sampel			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Kelompok Peternak/ Pengolahan dan/atau Lembaga Non Pemerintah	Revitalisasi Bangunan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Produk Olahan	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Rehabilitasi Jaringan Irigasi		
					- Wilayah Jawa dan Bali	Ha	
					- Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB	Ha	
					- Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	
					- Wilayah Papua dan PapuaBarat	Ha	
			2. Pengembangan Sumber Air	Kelompok Tani	Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan	Unit	
			3. Konservasi Air dan Anomali Iklim	Kelompok Tani	Pembangunan Dam Parit/ <i>Long Storage</i>	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4. Pembangunan Embung Pertanian	Kelompok Tani	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I	
			5. Pengembangan Sumber-sumber air mendukung peningkatan IP dan produktivitas	Kelompok Tani	Padat Karya Produktif - Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Paket		
		2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1. Perluasan Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah			
					- Wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali	Ha		
					- Wilayah: Maluku dan Papua	Ha		
			2. Optimalisasi Lahan Pertanian	Kelompok Tani	Optimasi Lahan: Rawa/Gambut dan Optimasi Lahan Sub Optimal	Ha		
		Optimasi Lahan Sawah Organik	Ha					

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan Traktor Roda 2	Unit	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
				Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan Traktor Roda 4	Unit	
				Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan Pompa Air	Unit	
				Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan <i>Rice Transplanter</i>	Unit	
				Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan <i>Cultivator</i>	Unit	
				Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan <i>Excavator</i>	Unit	
				Kelompok Tani/ UPJA/Brigade	Bantuan <i>Handsprayer</i>	Unit	
		4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	a. Pilot Percontohan Optimasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kelompok Tani/UPJA/RTM Petani/Kelompok RTM Petani	Bantuan Sarana dan Kandang	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Fasilitasi Penyediaan Bantuan Kandang Ayam/Itik mendukung Program #Bekerja				Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
		5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	1. Asuransi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	
			2. Asuransi Usaha Ternak Sapi	Kelompok Tani/ Kelompok Peternak	Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak	Ekor	
6.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi Tani	Bantuan Operasional Pembelajaran Pengadaan Saprodi dan Pengolahan Hasil Produksi	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh	1. Penyuluh	Penghargaan untuk Penyuluh Pertanian Teladan	Orang	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
				2. BPP	Penghargaan BPP Terbaik	Orang	
			3. Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan Pertanian	1. Petani	Penghargaan untuk Petani	Orang	
				2. Gapoktan	Penghargaan untuk Gapoktan	Orang	
				3. KEP	Penghargaan untuk KEP	Orang	
			2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	P4S	Bantuan Sarana dan Prasarana P4S	
					Pembangunan Asrama Pelatihan P4S	Paket	
		2. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan		1. P4S	Penghargaan P4S Berprestasi Tingkat Nasional	Orang	
				2. Widyaiswara	Penghargaan WI Berprestasi	Orang	
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1. Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) Untuk Peningkatan Kapasitas Petani	2. BBI Prov. Banten dan Jawa Tengah		Pengadaan Benih Padi Dasar/Label Kuning F-2 (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	
3. BBI Prov. Banten dan Jawa Tengah	Bantuan Fasilitas Perbanyak Benih (Prov. Banten dan Jawa Tengah)				Paket		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				4. Penangkar Benih Prov. Banten dan Jawa Tengah	Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3 (Prov. Banten dan Jawa Tengah)	Paket	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I	
				5. BBI	Pengadaan Benih Padi Dasar/Label Kuning F-2 dengan BB Padi Sukamandi	Paket		
			2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rumah Tangga Miskin	1. Pengadaan Ayam dan Vaksin Launching Program #Bekerja	Ekor		
						2. Pengadaan Pakan <i>Launching</i> Program #Bekerja Tahap I (1 Bulan)		Kilogram
						3. Pengadaan Pakan Program #Bekerja Tahap II (3 Bulan)		Kilogram
						4. Pengadaan Ayam, Vaksin dan Pakan Program #Bekerja		Ekor
			3. Layanan Internal Overhead	Mahasiswa STPP Magelang	Pengadaan <i>Handphone</i>	Unit		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Program Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Kelompok Usaha di Lembaga Pendidikan	1. Bantuan Operasional PWMP 2. Beasiswa PWMP	Paket Paket	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I
			2. Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	1. Siswa SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa	Orang	
				2. SMK-PP	1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi SMK-PP Polewali Mandar	Paket	
					2. Pembangunan RPS <i>Screen House</i> Budidaya Organik	M ²	
					3. Pengadaan Komputer (PC)	Unit	
			3. Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang Melakukan Pendampingan	Rumah Tangga Miskin	1. Pengadaan Ayam dan Vaksin <i>Launching</i> Program #Bekerja	Ekor	
					2. Pengadaan Pakan <i>Launching</i> Program #Bekerja Tahap I (1 Bulan)	Kilogram	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas strategis Pertanian		3. Pengadaan Pakan Program #Bekerja Tahap II (3 Bulan) 4. Pengadaan Ayam, Vaksin dan Pakan Program #Bekerja	Kilogram Ekor	Harga satuan dan lokasi prioritas akan dirinci dalam petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon I

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN